GELANDANGAN DALAM KERANGKENG RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Mahardhyka¹, SucianiYunus², NurulRamdhany³, Rahmat Amir⁴

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Amsir Parepare,

Email :

andhykaptr@gmail.com¹, suciani.yunus11@gmail.com², nurulramdhany02@gmail.com³,
phoenixalpha731@gmail.com⁴

ABSTRACT

This study is based on the polemic that occurred as a result of the Bill on the Penalty of Homeless People, which seemed to make them a social disease and to curb and discriminate against them. This research is presented with a doctrinal law research method, namely the research carried out is descriptive-analytical, namely describing, analyzing, concluding the problem which is the object of research and is expected to be able to explain, find, and describe government studies in the formation of law in Indonesia and does not violate the right to life. people. Therefore it can be concluded that a serious role for the government is needed in overcoming the problem of poverty in Indonesia, not only as a metaphor, while the problem of poverty dominates the prevalence of homelessness in Indonesia. a review of the criminalization of the homeless as regulated in Article 505 of the Criminal Code, where the implementation of the regulation is effective and the number of homeless people in Indonesia, especially in big cities in Indonesia is still large.

Keywords: law, conviction, criminal law, homelessness, human rights

Latar Belakang Masalah

Kitab Undang-undang Hukum Pidana sering disebut sebagai hukum warisan kolonial Belanda sehingga perlu direvisi dengan mengacu kepada hukum Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam proses revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini, terdapat pro dan kontra mengenai pasal-pasal yang direvisi, salah satunya yaitu menimbulkan polemik tentang pasal pemidanaan terhadap gelandangan. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan, yang disebut gelandangan itu adalah rakyat miskin yang harus dipelihara Negara.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nasir Djamil mengatakan penerapan pidana denda sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) bagi gelandangan sebagaimana tertuang di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bertujuan agar pemerintah memberikan perhatian kepada warga negaranya. "Maksudnya ini undang-undang mengharuskan yang namanya pemerintah melindungi supaya bagaimana gelandangan itu diberi insentif oleh negara, dilindungi

oleh negara”, kata Nasir kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jum’at (20/9).

Dia melanjutkan regulasi ini juga mewajibkan pemerintah untuk mencari dan memberikan solusi terkait gelandangan di Indonesia. Lebih jauh, Nasir menyadari tujuan penerapan pidana bagi gelandangan sebagaimana yang dia sampaikan terlihat tidak berkaitan. Namun, ia berdalih bahwa hukum tidak bisa berdiri sendiri dan gelandangan harus menjadi subjek hukum agar hukum dipatuhi oleh semua pihak. “Kalau kita ngomong seperti ini seolah tidak nyambung, tapi sebenarnya ini hukum tidak bisa berdiri sendiri. Tidak boleh berdiri sendiri. Makanya, negara sebagai negara hukum agar hukum dipatuhi dengan seorang gelandangan, maka orang gelandangan juga harus jadi subjek”, ucap politikus PKS itu.

Pasal mengenai gelandangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bukan hal baru. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku selama ini juga mengatur tentang gelandangan tetapi dengan ancaman pidana yang berbeda. Akan tetapi, substansinya tetap sama. Gelandangan adalah orang-orang yang didakwa melanggar hukum karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Nah pertanyaannya adalah ketika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diterbitkan dan memiliki ganjaran terhadap gelandangan tersebut yaitu denda Rp1.000.000 (satu juta rupiah), apakah mereka mampu membayar ataukah harus tekun menggelandang untuk membayar denda mereka?

Pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang gelandangan ini seakan-akan merenggut dan memenjarakan hak asasi mereka untuk hidup dimana Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang di gunakan ini masih menganut hukum jajahan Belanda dan di gantikan oleh elit politik yang mengatakan diri mereka ahli dalam mewakili rakyat padahal mereka hanya menjadikan masyarakat lemah dan bawah sebagai ajang formalitas mereka untuk menaikkan elektabilitas mereka. Padahal pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Pasal 432 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini jelas berpotensi mengekang dan mengkriminalisasi terhadap masyarakat tidak mampu yang hak konstitusionalnya harusnya dipelihara negara sebenarnya karena sudah dijamin konstitusi,” ujar Bayu saat dihubungi Kompas.com.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka permasalahan ini timbul pertanyaan yaitu apakah pemidanaan terhadap gelandangan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah mencerminkan keadilan dan Apa urgensi pemidanaan terhadap gelandangan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana? Semua yang timbul dalam pertanyaan ini akan dibahas sedemikian rupa dalam artikel ini.

Metode Penelitian

Dalam penyusunan artikel ini menggunakan metode penelitian normatif, yakni penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menganalisis, menyimpulkan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian.^{1,2}

Analisis Dan Pembahasan

A. Faktor penyebab Maraknya Gelandangan di Indonesia

Gelandangan disebut sebagai salah satu penyakit sosial atau penyakit masyarakat (patologi sosial). Segala bentuk tingkah laku dan gejala-gejala sosial yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum dikategorikan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat.³

Dalam perkembangan masyarakat Indonesia, kegiatan menggelandang ini ternyata masih menjadi primadona tersendiri bagi orang-orang yang malas apalagi bagi orang-orang yang tinggal di desa dan berencana mengadu nasib ke kota tanpa dibekali dengan keterampilan ataupun kemampuan yang cukup. Hal tersebut membuktikan bahwa menggelandang tidaklah mudah dan memerlukan kemampuan serta jiwa yang berani untuk menggelandang, akan tetapi bagi sebagian orang yang tidak memiliki rasa malu, maka kegiatan menggelandang merupakan hal yang mudah dan paling enak untuk dijalani.

¹ Syahrudin Nawi. 2017. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika. Hal. 9

² Sinta Dewi, 'Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016), Hal 25. <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V5i1.8712>.

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Ed. 1, Cet. 5, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003), hlm. 4.

Secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan seseorang menjadi gelandangan, yaitu:

1. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal dan menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat mengembangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
2. Rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
3. Kurangnya keterampilan kerja menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
4. Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. Terdapat beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan, yaitu:
 - a) Rendahnya harga diri pada sekelompok orang, mengakibatkan tidak dimilikinya rasa malu untuk tak segan terkadang sampai meminta-minta.
 - b) Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan adalah nasib, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
 - c) Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga tak jarang menjadi salah satu mata pencaharian.⁴

Sementara itu, Artidjo Alkostar dalam penelitiannya tentang kehidupan gelandangan menguraikan bahwa terjadinya gelandangan dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik maupun cacat psikis. Sedangkan, faktor eksternal meliputi faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis.⁵

Berdasarkan uraian mengenai faktor-faktor penyebab tersebut diatas, maka tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kemiskinan adalah menjadi faktor yang dominan menyebabkan munculnya gelandangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, fenomena gelandangan juga terjadi dan dapat ditemukan di luar

⁴ Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, 2010

⁵ Alkotsar, Artidjo., *Advokasi Anak Jalanan*, Rajawali, Jakarta, 1984.

negeri. Terdapat banyak faktor penyebab timbulnya permasalahan gelandangan tersebut. Sama halnya dengan di Indonesia, faktor kemiskinan ini ternyata juga menjadi penyebab utama munculnya fenomena gelandangan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Faktor kemiskinan tersebut diatas yang juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dan sosial dapat menyebabkan munculnya permasalahan gelandangan di kalangan masyarakat Indonesia.

Seperti yang dikemukakan oleh Judith Goode dan Jeff Maskovsky sebagai berikut: *“People become homeless for a variety of reasons. Homelessness is primarily an economic problem, and is also affected by a number of social and political factors”*. “Orang menjadi tunawisma karena berbagai problematika. Tunawisma pada dasarnya timbul karena masalah ekonomi dan juga dipengaruhi oleh sejumlah factor sosial dan politik”, *Judith Goode and Jeff Maskovsky, The New Poverty Studies : The Ethnography of Power, Politics and Impoverished*.⁶

B. Polemik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Mengenai Pemidanaan Terhadap Gelandangan Melalui Kajian Perpektif Filsafat Hukum Serta Munculnya Penyebab Polemik Tersebut

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum, tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang mendasar itu. Gustav Radbruch merumuskannya dengan sederhana, yaitu bahwa filsafat hukum itu adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar, sedangkan Langemeyer mengatakannya pembahasan secara filosofis tentang hukum.⁷ Apabila diteliti definisi, perumusan maupun uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para penulis filsafat hukum itu sepakat bahwa filsafat hukum itu adalah sebagai cabang filsafat, yaitu filsafat etika atau moral;

- a. Bahwa yang menjadi objek pembahasannya adalah hakikat hukum, yaitu inti atau dasar yang sedalam-dalamnya dari hukum;

⁶ Judith Goode and Jeff Maskovsky, *The New Poverty Studies: The Ethnography of Power, Politics and impoverished People in The United States*, New York University Press, New York, 2007.

⁷ Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Ed. 8, Cet. 1, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2018), hlm. 1.

- b. Mempelajari/menyelidiki lebih lanjut hal-hal yang tidak dapat dijawab oleh ilmu hukum.⁷

Beberapa permasalahan yang dikaji filsafat hukum salah satunya adalah mengenai "*law is a tool of social engineering*", yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi "hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat", yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa Undang-Undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya.

Salah satu contohnya adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana Indonesia didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipandang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum pidana nasional Indonesia.
2. Perkembangan Hukum Pidana diluar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik berupa hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi telah menggeser keberadaan sistem hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keadaan ini telah mengakibatkan terbentuknya lebih dari satu sistem hukum pidana yang berlaku dalam sistem hukum pidana nasional.
3. Dalam beberapa hal telah juga terjadi duplikasi norma hukum pidana antara norma hukum pidana dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan norma hukum pidana dalam undang-undang di luar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Secara umum dalam hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan ternyata dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yaitu sebagai pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menegaskan sebagai berikut:

1. "Barang siapa bergelandangan tanpa pencaharian, diancam, karena melakukan pergelandangan, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan".
2. "Pergelandangan yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, yang umurnya di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan".⁸

⁸ Moeljatno, *KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. ke-30, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sebelumnya telah sepakat untuk membawa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ke rapat paripurna untuk disahkan. Namun masih banyak penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, Salah satunya menyangkut pasal gelandangan ini.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP yang tengah dibahas Dewan Perwakilan Rakyat memuat pasal soal gelandangan yang bisa dipidana. Anggota Panitia Kerja DPR, Nasir Djamil menjelaskan, pasal ini harus dilihat dengan perspektif lain, yakni bahwa negara harus melindungi para gelandangan itu. “Makanya negara harus bertanggung jawab agar warganya tidak jadi gelandangan”, kata Nasir kepada wartawan, Kamis, 19 September 2019. (CNN Indonesia, 2019)

Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitulu menilai pasal tersebut seharusnya dihapus. Sebab merupakan aturan warisan kolonial Belanda yang memandang kaum gelandangan sebagai : Orang yang tak berguna akibat kesalahan dalam hidupnya.

Ketentuan tentang gelandangan ini diatur dalam Pasal 431 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal itu menyebutkan bahwa “Setiap orang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I” Rp1.000.000 (satu juta rupiah).

Jika draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini disahkan, memidanakan gelandangan bukal hal yang sulit lagi bagi negara. Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh negara”, bukan malah dikenakan denda.⁷

Nasir mengatakan, pasal ini disusun terkait bagaimana menjaga ketertiban umum. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, mensyaratkan bahwa pemerintah harus memastikan gelandangan diberi insentif dan dilindungi oleh negara. Jadi harus dilihat terbalik, dari porsi negaranya. Jadi jangan kemudian kita bertanya-tanya, gelandangan tak punya apa-apa secara status sosial, kok dipidana?” ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

Namun Nasir tak menjelaskan dengan rinci mengapa redaksional dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu meletakkan tanggung jawab pada gelandangan, bukannya negara. Menurut dia, pasal tersebut secara tidak langsung memerintahkan kepada penyelenggara negara agar memperhatikan warga negaranya. “Kalau kita ngomong seperti ini seolah tidak nyambung, tapi sebenarnya ini hukum tidak bisa berdiri sendiri. Tidak boleh berdiri sendiri. Makanya negara sebagai negara hukum,

agar hukum dipatuhi dengan seorang gelandangan, maka orang gelandangan juga harus jadi subjek,” kata dia

Sedangkan dalam prinsipnya dan tujuannya pemidanaan terhadap gelandangan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih belum mencerminkan keadilan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyoroti aturan tersebut. Mereka menilai Pasal 432 itu berpotensi menjadi masalah kriminalisasi yang berlebihan. “Isu yang paling menggelikan (dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah masalah penggelandangan yang diancam dengan pidana denda hingga Rp1.000.000 (satu juta rupiah)”, tulis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia melalui keterangan di laman resmi.⁹

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly mengklarifikasi soal pasal dan norma dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menuai kontroversi. Salah satunya, Pasal 432 tentang pemidanaan gelandangan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa “Setiap orang yang bergelandangan di jalan atau di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I”.¹⁰

Pasal ini menuai kontroversi, sebab gelandangan terancam pidana denda kategori I yakni sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah). Kata Yasonna, pasal penggelandangan tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan Belanda itu menerapkan pidana kurungan. Di mana, dalam Pasal 505 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, “Barang siapa bergelandangan tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan”.

“Pengemis ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita atur justru kita mudahkan, kita kurangi hukumannya,” kata Yasonna di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/9/2019). (OKENEWS, 2019)

Yasonna mengatakan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, gelandangan yang ditangkap dapat didenda atau berdasarkan putusan hakim dimasukkan dalam pelatihan agar dapat bekerja. Hal ini berbeda dengan Kitab

⁹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920092300-32-432169/dpr-gelandangan-didenda-di-rkuhp-agar-pemerintah-melindungi> 5/2/21 11.21 am

¹⁰<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/20/19495591/soal-pasal-gelandangan-dalam-rkuhp-ini-penjelasan-menkumham> 5/2/21 11.22 am

Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana penjara atau perampasan kemerdekaan. Dimungkinkan dengan hukuman kerja, ditangkap gelandangnya disuruh bekerja oleh hakim. Ini kalau dalam hukum Belanda itu perampasan kemerdekaan penjara, kalau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sekarang gelandangan itu ditangkap dimasukan dipidana, diambil kemerdekannya. Kalau ini tidak, disuruh kerja pengawasan kerja sosial.tujuannya demikian,” ucapnya. (OKENEWS, 2019)

Sedangkan aktivis Hak Asasi Manusia Haris Azhar terang-terangan memberikan pernyataan keras pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Yasonna Laoly di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), yang ditayangkan tvOne pada Selasa (24/9/2019). Dalam acara yang dipandu Karni Ilyas tersebut, Haris Azhar menyoroti pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait gelandangan, yang sebelumnya diterangkan Yasonna Laoly. Ia mempertanyakan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang tidak melibatkan seluruh pihak.

Dirinya juga menyindir Yasonna Laoly dan anggota Komisi III DPR Asrul Sani di ILC dalam pernyataannya. “Kalau hanya mengandalkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang hanya atau harus ke kampus-kampus, gembel enggak ke kampus!” seru Haris Azhar. (Indonesia Lawyers Club, 2019)

“Gembel enggak nonton acara ILC, yang dengar pidato yang sangat luar biasa dari pak menteri. Gembel enggak nonton ILC karena dia harus tidur di gerobak, enggak denger pendapat-pendapat dari anggota dewan yang hebat-hebat pakai jas, cincinnya mahal-mahal,” lanjutnya.

Setelah itu, pria yang berprofesi sebagai pengacara tersebut juga blak-blakan membalikkan ucapan Yasonna Laoly terkait undang-undang yang mengatur gelandangan. “Pak Menteri tadi seolah-olah hebat, membela gembel, dari dihukum menjadi dikasih denda, itu tradisi-tradisi di negara barat, yang dicegah, tadi katanya enggak mau cari tradisi-tradisi negara-negara barat!” katanya, tegas.

Haris Azhar lantas mempertanyakan produk undang-undang di Indonesia yang bisa memperbaiki nasib gelandangan. Menurutnya, justru pemerintah membuat banyak warga Indonesia menjadi gembel dengan paket Rancangan Undang-Undang bermasalah yang belakangan ini disebut DPR.

“Jadi justru bakal banyak gembel di negeri kita karena memang paket perundang-undangan yang dibahas oleh DPR itu mementingkan kelompok-kelompok pebisnis,” imbuhnya. (Indonesia Lawyers Club, 2019)

Sedangkan aturan mengenai pemidanaan terhadap gelandangan tersebut dalam Pasal 432 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diketahui bertentangan dengan Pancasila pada sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” serta Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Farkir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara”.

Dalam hal ini, gelandangan yang dipidana bukanlah tindakan bijak dari pemerintah yang dapat mencerminkan ketidakadilan terhadap warga negaranya. Tetapi, sudah menjadi tugas pemerintah menerapkan aturan mengenai gelandangan tetapi tidak dengan jalan dipidana melainkan dengan jalan dibina. Karena gelandangan itu sendiri merupakan bentuk dari gagalnya pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly mengenai permasalahan terhadap Pasal 432 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang gelandangan tersebut sebenarnya sudah diatur juga didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini berlaku yaitu Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahkan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan Belanda itu menerapkan pidana kurungan. Ia berdalih bahwa pemidanaan terhadap gelandangan yang diatur di dalam Pasal 432 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana justru dipermudah aturannya dengan mengurangi hukuman terhadap gelandangan tersebut.

Tujuan dari pemidanaan terhadap gelandangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, gelandangan yang ditangkap dapat didenda atau berdasarkan putusan hakim dimasukkan dalam pelatihan kerja sosial agar dapat bekerja. Hal ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pidana penjara atau perampasan kemerdekaan.

Tetapi, pada dasarnya aturan tersebut juga menimbulkan defiasi terhadap tradisi hukum ke Timuran di Indonesia, dimana dalam penjelasan seorang Aktivis Hak Asasi Manusia yang berprofesi sebagai pengacara, Haris Azhar mengatakan bahwa ancaman pidana kurungan yang diatur didalam Pasal 505 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tradisi Barat.

Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan, mengingat keberadaan gelandangan

¹¹<https://nasional.okezone.com/read/2019/09/20/337/2107469/polemik-rkuhp-menkumham-klarifikasi-tentang-pasal-gelandangan-didenda-rp1-juta> 5/2/21 11.25 am

tersebut selain merupakan penyakit sosial yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia yang kemudian menimbulkan berbagai polemik terkait pemidanaan terhadap gelandangan tersebut.

Di dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak konstitusional warga Negara termasuk mengenai permasalahan gelandangan di Indonesia. Pemerintah, gelandangan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 saling berhubungan. Perhatikan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” kemudian lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” dan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa “Farkir miskin dan anak-anak yang terlantar di pelihara oleh negara”.

Tetapi pada kenyataannya, permasalahan mengenai gelandangan di Indonesia selama belum teratasi dengan baik dan bijak. Belum ada produk perundang-undangan yang substansinya untuk memperbaiki nasib gelandangan. Justru perbuatan gelandangan itu dikategorikan sebagai pidana “pelanggaran”. Padahal, maraknya gelandangan tersebut terutama di kota-kota besar adalah dampak dari gagalnya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan mensejahterakan rakyatnya. Sudah jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan, mensejahterakan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”, hal ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.

Hal serupa diutarakan peneliti Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Rivanlee Anandar. Menurutnya, pemerintah harusnya justru bertindak aktif mencari solusi. Agar tak ada lagi masyarakat yang memilih jalan hidup sebagai gelandangan, bukan malah memidanakannya. Menurut Rivanlee, pasal ini sangat diskriminatif mengingat gelandangan juga berjuang untuk hidup sehari-hari.

C. Urgensi Pemidanaan Terhadap Gelandangan yang Diatur Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Secara substansi, ketentuan hukum pidana bagi gelandangan tetap diperlukan dalam rangka menanggulangi permasalahan gelandangan di Indonesia. Faktanya, dengan adanya ketentuan sanksi pidana tersebut belum sesuai dengan fungsi hukum sebagai sarana untuk mengarahkan dan membina masyarakat (*law as a tool of social*

engineering)¹². Ketentuan pasal tersebut bertujuan agar dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat dan membuat masyarakat itu tidak memilih untuk melakukan kegiatan sebagai gelandangan.

Gelandangan yang harusnya diperhatikan pemerintah dan harusnya dipelihara oleh negara justru diancam pidana dalam Pasal 432 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana logikanya, apabila tujuan adanya pasal tersebut untuk memaksa pemerintah agar memperhatikan warganya, maka pejabat pemerintahlah yang seharusnya diancam pidana jika di wilayahnya terdapat warga yang menjadi gelandangan. Misalnya, di tingkat daerah, Bupati atau Walikota lah yang mestinya dianggap melanggar hukum karena lalai memperhatikan warganya dan tidak menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945, sehingga ada yang sampai tidur di jalanan, meminta-minta agar bisa makan sehingga tak jarang hal tersebut menimbulkan terganggunya ketertiban umum.

Saat ini, masih ada harapan untuk mengubah atau meninjau ulang pasal-pasal kontroversial Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menimbulkan polemik di masyarakat, termasuk Pasal 432 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang gelandangan, karena Presiden Joko Widodo telah meminta DPR menunda pengesahan. Apabila semangat merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana agar kita tidak lagi menggunakan produk kolonial dan tradisi-tradisi Barat, sebaiknya pasal mengenai gelandangan seperti ini akan lebih bijak kalau bunyinya “Pemerintah Daerah seperti Bupati atau Walikota dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I apabila di wilayahnya ada satu warga yang menjadi gelandangan”.

Bunyi pasal seperti itu akan sangat tepat menjadi instrumen dalam memaksa pemerintah agar memperhatikan warga negaranya (agar tidak menjadi gelandangan), atau jika para gelandangan memang ditakdirkan sebagai orang yang dibenci dan dimusuhi negara karena dianggap mengganggu ketertiban umum sehingga perlu dibuat Undang-Undang untuk memidanakan, amandemen Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjadi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipidana oleh negara”.

Diperlukan peran pemerintah yang bersungguh-sungguh dalam mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, jangan hanya dijadikan kiasan semata sementara permasalahan kemiskinan lah yang mendominasi maraknya gelandangan di Indonesia.

Sebaiknya pemerintah melakukan peninjauan kembali mengenai pembedaan

¹² Otje Salman, dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Ed. Ke-2 Cet. ke-1, (Alumni, Bandung, 2004), hlm. 33.

terhadap gelandangan yang diatur dalam Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana penerapan aturan tersebut dalam faktanya tidak efektif dan jumlah gelandangan di Indonesia terutama di kota-kota besar di Indonesia terbilang masih banyak.

Begitu juga dengan Pasal 432 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena pada dasarnya aturan tersebut belum mencerminkan keadilan dan bertentangan dengan landasan filosofis Negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dimana dampaknya dapat menimbulkan kriminalisasi bagi masyarakat miskin, seperti pengamen dan disabilitas terlantar.

Kata-kata terakhir sebelum saya tutup makalah ini saya mengutip dari perkataan Rivanlee Anandar bahwa “Hidup menggelandang bukan hanya merupakan sebuah keadaan yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, tetapi juga merupakan sebuah pilihan hidup. Perlu akal sehat dan jiwa yang matang dalam menangani permasalahan gembel di kota”, karena “Pidana terhadap gelandangan tidak akan menjawab persoalan penyelesaian gelandangan tersebut”.

Penutup

Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kemiskinan adalah menjadi faktor yang dominan menyebabkan munculnya gelandangan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara umum dalam hukum positif Indonesia, kegiatan pergelandangan dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*) di bidang ketertiban umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang tengah dibahas DPR memuat pasal soal gelandangan yang bisa dipidana menjelaskan, pasal ini harus dilihat dengan perspektif lain, yakni bahwa negara harus bertanggung jawab melindungi warganya agar tidak jadi gelandangan dengan pemerintah memberi insentif terhadap gelandangan tersebut. Pasal 432 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini disusun terkait bagaimana menjaga ketertiban umum. Aturan mengenai pemidanaan terhadap gelandangan tersebut dalam Pasal 432 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diketahui bertentangan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, gelandangan yang dipidana bukanlah tindakan bijak dari pemerintah yang dapat mencerminkan ketidakadilan terhadap warga negaranya. Tetapi, sudah menjadi tugas pemerintah menerapkan aturan mengenai gelandangan tetapi tidak dengan jalan dipidana melainkan dengan jalan diarahkan dan dibina. Karena gelandangan itu sendiri merupakan bentuk dari gagalnya pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Referensi

Syahrudin Nawi.2017. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, 5th. Makassar:PT.Umitoha Ukhuwah Grafika.

Sinta Dewi, 'Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia', *Yustisia Jurnal Hukum*, 5.1 (2016), 22–30. <https://doi.org/10.20961/Yustisia.V5i1.8712>.

Alkotsar, Artidjo., *Advokasi Anak Jalanan*, Rajawali, Jakarta, 1984.

Judith Goode and Jeff Maskovsky, *The New Poverty Studies: The Ethnography of Power, Politics and impoverished People in The United States*, New York University Press, New York, 2007.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial II Kenakalan Remaja*, Ed. 1, Cet. 5, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Lili Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Ed. 8, Cet. 1, CV. Mandar Maju, Bandung, 2018.

Moeljatno, *KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cet. ke-30, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Otje Salman, dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Ed. Ke-2 Cet. ke-1, Alumni, Bandung, 2004.

Ahmad, Maghfur, 2010. Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng), *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan*, Vol. 7/No. 2, Pekalongan

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI. (2010).

Dipetik 9 21, 2019, dari Fenomena Munculnya Gelandangan dan Pengemis:

<http://rehsos.kemsos.go.id/modules.php/article=1066>

CNN Indonesia.(2019, 9 20). Dipetik 9 21, 2019, dari DPR: Gelandangan Didenda di RKUHP Agar Pemerintah Melindungi :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920092300-32-432169/dprgelandangan-didenda-di-rkuhp-agar-pemerintah-melindungi>

Indonesia Lawyers Club.(2019, 9 24). Dipetik 9 24, 2019, dari KERAS!! Haris Azhar Kritik Pernyataan Yasonna Laoly Soal RKUHP:

<https://www.youtube.com/watch?v=HT8aB-CR2nE>

<https://tirto.id/rkuhp-rasa-penjajah-gelandangan-pengemis-mudah-dijerat-pidana-eh-vt-5/2/21-11.08> am

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190920092300-32-432169/dpr-gelandangan-didenda-di-rkuhp-agar-pemerintah-melindungi-5/2/21-11.21> am

<https://nasional.okezone.com/read/2019/09/20/337/2107469/polemik-rkuhp-menku-mham-klarifikasi-tentang-pasal-gelandangan-didenda-rp1-juta-5/2/21-11.25> am

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.